



Laporan Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Banten

Tahun 2017

Integritas-Independensi-Profesionalisme



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten	2
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten.....	3
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Banten	6
E. Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. <u>Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten</u>	8
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.....	16
B. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Banten.....	33
BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten	7
Tabel 2.1 Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten 2016-2020	11
Tabel 2.2 IKU BPK Perwakilan Provinsi Banten	14
Tabel 3.1 Realisasi IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2017	16
Tabel 3.2 Realisasi IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke APH Tahun 2017	18
Tabel 3.3 Realisasi IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara Tahun 2017	18
Tabel 3.4 Realisasi IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2017	19
Tabel 3.5 Realisasi IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang Tahun 2017	19
Tabel 3.6 Realisasi IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2017	20
Tabel 3.7 Realisasi IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP Tahun 2017	21
Tabel 3.8 Realisasi IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Tahun 2017	22
Tabel 3.9 Realisasi IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Tahun 2017	22
Tabel 3.10 Realisasi IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP Tahun 2017	23
Tabel 3.11 Realisasi IKU 3.4 Indeks Kepuasan Audittee atas Kinerja Pemeriksa BPK Tahun 2017	23
Tabel 3.12 Realisasi IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2017	24
Tabel 3.13 Realisasi IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang Tahun 2017	25
Tabel 3.14 Realisasi IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2017	25
Tabel 3.15 Realisasi IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2017	26

Tabel 3.16 Realisasi IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang Triwulan IV tahun 2017	26
Tabel 3.17 Realisasi IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten triwulan IV tahun 2017	27
Tabel 3.18 Realisasi IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2017	28
Tabel 3.19 Realisasi IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice Tahun 2017	28
Tabel 3.20 Realisasi IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice Tahun 2017	28
Tabel 3.21 Realisasi IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017	29
Tabel 3.22 Realisasi IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan Tahun 2017	29
Tabel 3.23 Realisasi IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan Tahun 2017	30
Tabel 3.24 Realisasi IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana tahun 2017	30
Tabel 3.25 Realisasi IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin Tahun 2017	31
Tabel 3.26 Realisasi IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa Tahun 2017	31
Tabel 3.27 Realisasi IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) Tahun 2017	32
Tabel 3.28 Realisasi IKU 7.1 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Tahun 2017	33
Tabel 3.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program Tahun 2017	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor Perwakilan Provinsi Banten	3
Gambar 1.2 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten	4
Gambar 1.3 Komposisi SDM BPK Perwakilan Provinsi Banten	6
Gambar 1.4 Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Banten	7
Gambar 2.1 Peta Strategi BPK Wide	9
Gambar 2.2 Gambar Peta Strategi AKN V	10
Gambar 2.3 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Banten	11
Gambar 3.1 Grafik Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	17
Gambar 3.2 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan

Lampiran 2 Target Pencapaian Kinerja Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

Lampiran 3 Perbandingan Realisasi Capaian Tahun Pelaporan Dengan Target Lima Tahun

Lampiran 4 Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan tahap pertama dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten tahun 2017 dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan

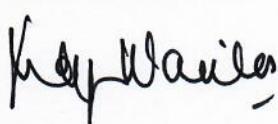
strategis BPK Perwakilan Banten sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2016-2020. Laporan ini memuat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten selama Tahun 2017 sebagai bentuk pelaporan dan bahan evaluasi dalam upaya perbaikan manajemen kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Secara garis besar, pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang positif bila dibandingkan target yang telah ditetapkan, hal ini tercermin dari skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017 sebesar 99,09. Namun demikian masih terdapat tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten dan menentukan langkah serta kebijakan selanjutnya untuk mendukung perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 30 Januari 2018
BPK Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan,


T. Ipoeng Andjar Wasita
NIP 196812211989031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan. Serta ditandatanganinya Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017, maka perlu disusun Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Banten. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tingkat kinerja Perwakilan Provinsi Banten pada Tahun 2017, mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja serta masukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penilaian atas pencapaian kinerja dalam SIMAK BPK dengan cara membandingkan realisasi pencapaian suatu Indikator Kerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan pada Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten

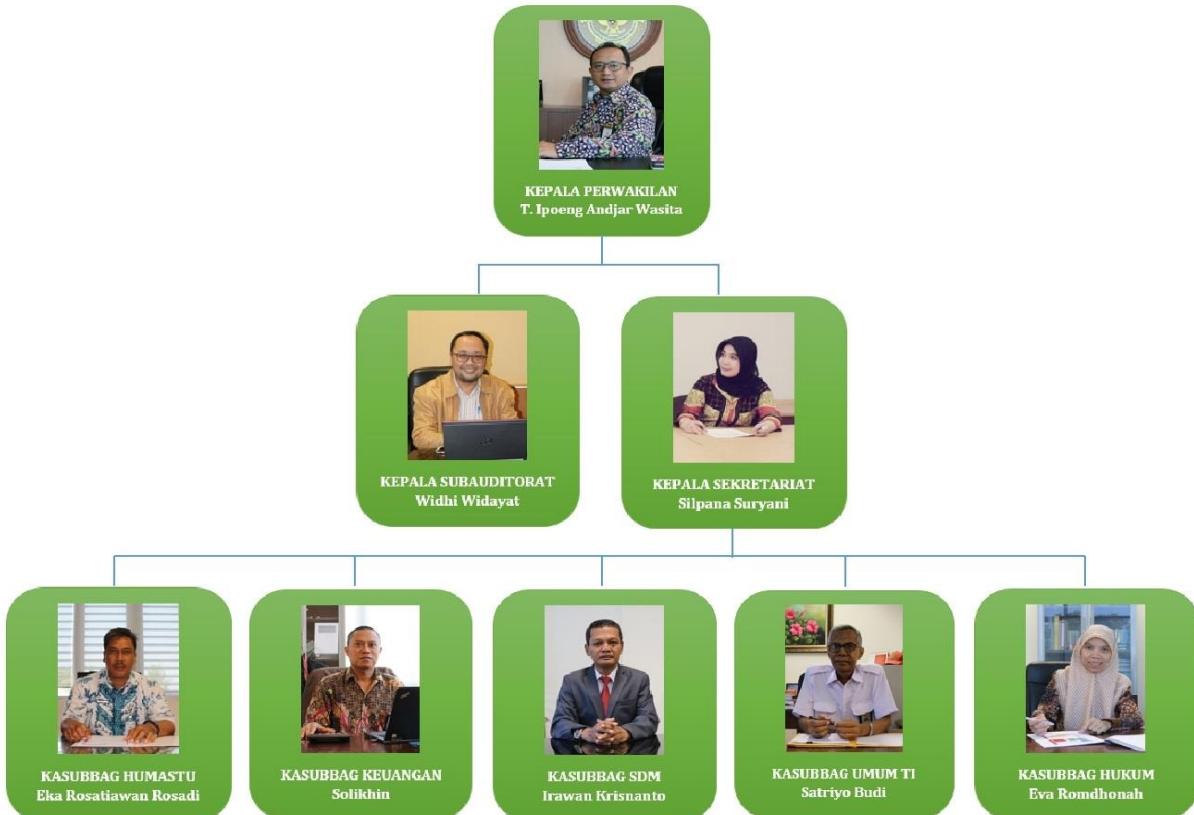
BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Satu dari tujuh unit pelaksana tugas pemeriksaan adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah di wilayah Indonesia Bagian Barat serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung oleh beberapa satuan kerja (satker) eselon II, yaitu Auditorat VA dan Auditorat VB yang berkedudukan di Kantor Pusat, serta Perwakilan BPK yang berkedudukan di masing-masing provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan salah satu perwakilan di bawah AKN V yang memiliki tugas dan fungsi pemeriksaan keuangan daerah, yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Entitas pemeriksaan Perwakilan BPK Provinsi Banten terdiri dari sembilan entitas yaitu Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sesuai mandat Undang-Undang, berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya, Perwakilan Banten melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh masing-masing entitas pemeriksaan merupakan asersi terakhir yang disampaikan oleh pemerintah daerah.



Gambar 1.1 Kantor Perwakilan Provinsi Banten

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten



Gambar 1.2 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Banten adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V yang terdiri dari:

1. Subauditorat Banten

Subauditorat Banten mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

2. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Banten dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

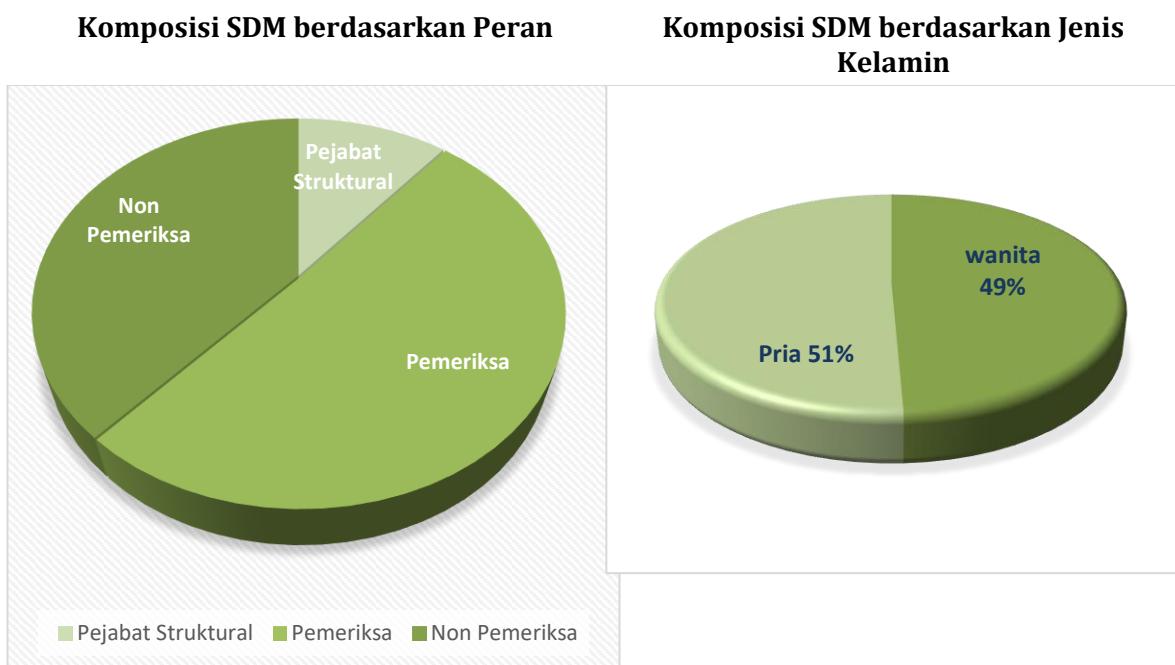
Sekretariat Perwakilan Provinsi Banten terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

- c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perpendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
- e. Subbagian Hukum melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Banten

Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Banten posisi per Desember Tahun 2017 berjumlah 73 orang meliputi 8 personil struktural (10,96 % yang terdiri dari 1 Kepala Perwakilan, 1 Kepala Subauditorat, 1 Kepala Sekretariat Perwakilan, dan 5 Kepala Subbagian), 28 personil di unit kerja penunjang pendukung (38,36%) dan 37 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat (50,68%). Berdasarkan jenis kelamin SDM terdiri dari 36 personil wanita (49%) dan 37 personil pria (51%).



Gambar 1.3 Komposisi SDM BPK Perwakilan Provinsi Banten



Gambar 1.4 Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Banten

E. Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten

BPK Perwakilan Provinsi Banten menganggarkan kegiatan tahun 2017 sebesar Rp18.459.476.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten

Kegiatan	Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp8.215.867.000,00
Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	Rp831.115.000,00
Manajemen Sumber Daya Manusia	Rp6.358.608.000,00
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Rp486.332.000,00
Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	Rp2.567.554.000,00
Total Anggaran	Rp18.459.476.000,00

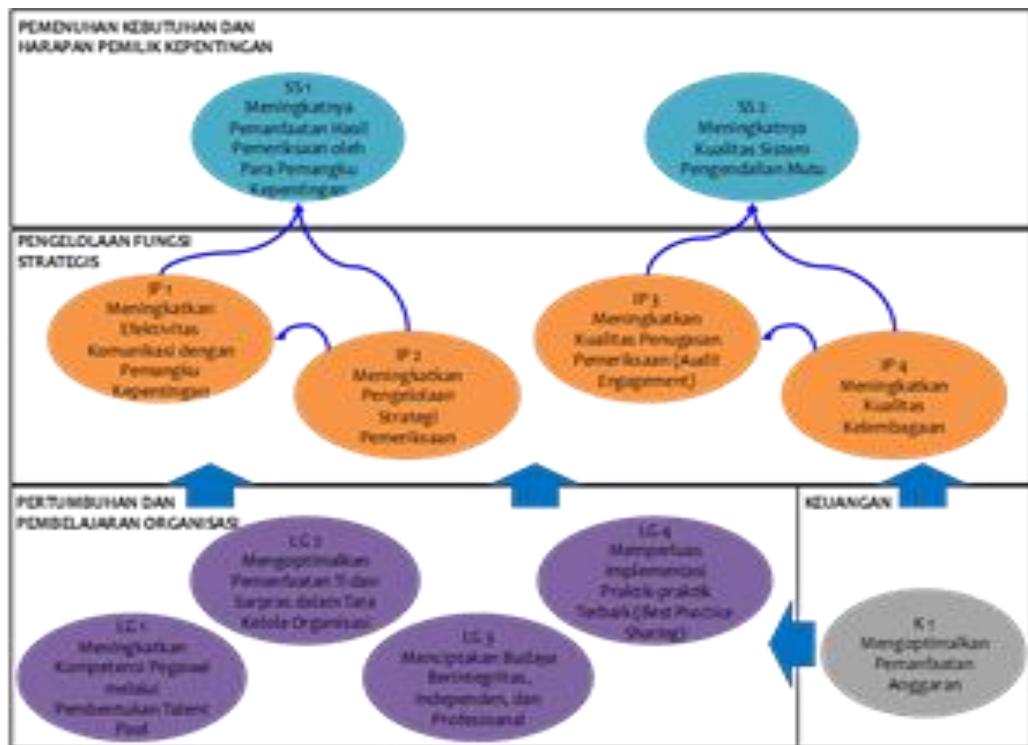
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten

Renstra 2016-2020 yang ditetapkan melalui Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2016 tanggal 28 Desember 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 digunakan sebagai rencana lima tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya. Renstra BPK memuat strategi, kebijakan dan program pemeriksaan yang dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dikaitkan dengan tujuan negara tersebut serta memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan BPK dimaksudkan agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara.

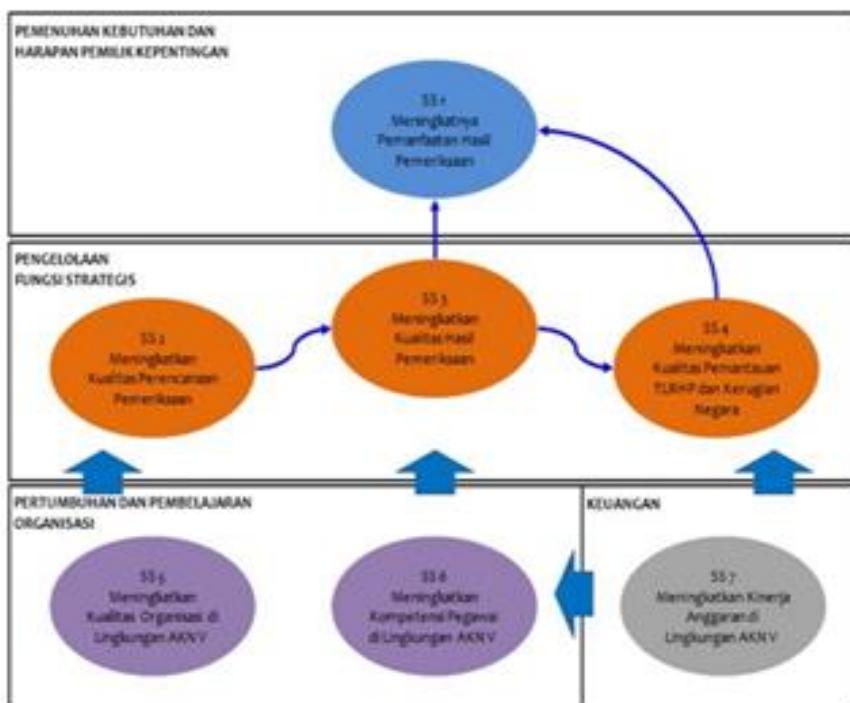
Tujuan Strategis BPK adalah 1) Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; 2) meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. BPK menetapkan 11 sasaran strategi (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategi BPK Wide sebagai berikut.



Gambar 2.1 Peta Strategi BPK Wide

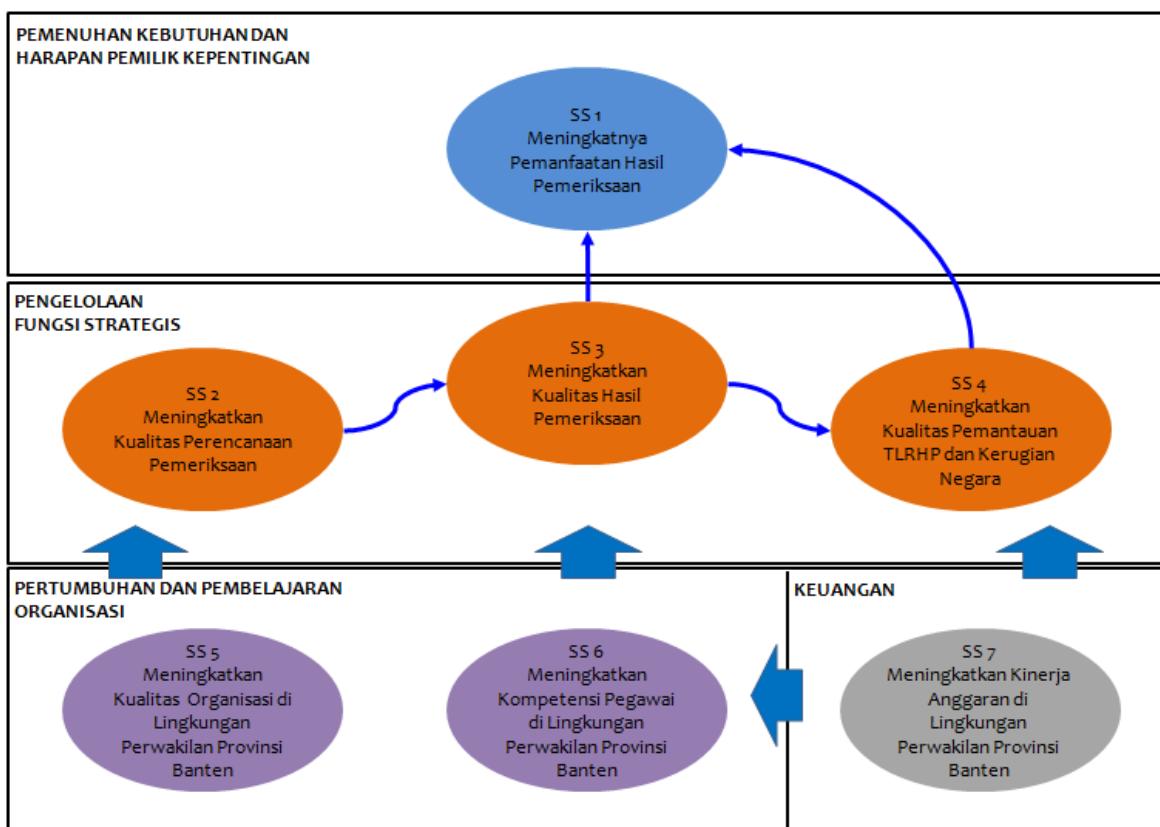
Dari 11 sasaran strategis yang ditetapkan dalam BPK Wide, Auditorat Utama Keuangan Negara V menetapkan 7 sasaran stategis yaitu: 1) Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan, 2) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan, 3) Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan, 4) Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara, 5) Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan AKN V, 6) Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan AKN V dan 7) Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan AKN V. Berikut adalah Peta Strategi Auditorat Keuangan Negara V.

Peta Strategi AKN V



Gambar 2.2 Gambar Peta Strategi AKN V

Perwakilan Banten memiliki peranan strategi dalam mencapai tujuan strategis badan dengan Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan (SS1), Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan (SS2), Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan (SS3) Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara (SS4), Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten (SS5), Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten (SS6), Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten (SS7) . Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam rangka mendukung pencapaian 7 sasaran strategi BPK tersebut dapat digambarkan dalam peta strategi Perwakilan Provinsi Banten berikut ini.



Gambar 2.3 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Banten

Disamping itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan strategis dan sasaran strategis, Perwakilan Provinsi Banten menetapkan target kinerja selama lima tahun (2016-2020) pada tujuh sasaran strategis yang masing-masing memiliki ukuran keberhasilannya (IKU) sebagai berikut.

Tabel 2.1 Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten 2016-2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan Audittee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,8	3,9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
SS 1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	86%	87%	88%
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	18%	18%	18%	18%
	IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18	18	18	18
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
		Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang				
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten	A	A	A	A
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.3	Persentase penyusunan <i>best-practice</i>	0%	0%	0%	0%
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	0%	0%	0%
	IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%
	IK 5.6	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%
	IK 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	2	2	2
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	96%	97%	98%
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%
	IK 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	90%	92%	94%	95%

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian

IKU yang dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun Anggaran 2017 dan telah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Banten selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V).

Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017:

Tabel 2.2 IKU BPK Perwakilan Provinsi Banten

No. SS	Sasaran Strategis (SS)	No. IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%
		IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
SS 2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
		IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%
SS 3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control (QC)</i> Pemeriksaan	100%
		IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance (QA)</i> Pemeriksaan	100%
		IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
		IKU 3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7
		IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%
SS 4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18
		IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
SS 5	Meningkatkan Kualitas	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten	A

	Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		IKU 5.3 Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0
		IKU 5.4 Persentase penyebaran <i>best practice</i>	0%
		IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LAK Perwakilan Provinsi Banten	100%
		IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
		IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	2
		IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%
		IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
SS 6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
SS 7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	82%

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui tiga program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan Kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK, sebagai berikut:

1. Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: 1) Pemeriksaan Keuangan Negara; 2) Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; 3) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi; dan 4) Perhitungan Kerugian Negara/Daerah.
2. Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: 1) Layanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri; 2) Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia; dan 3) Layanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK.
3. Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK yang berupa kegiatan Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum.

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah mencapai skor kinerja tahun 2017 yaitu sebesar 99,09. Berikut adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017:

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan diukur melalui 5 IKU, yaitu IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan target tahun 2017 sebesar 65%, IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke APH dengan target tahun 2017 sebesar 100%, IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dengan target tahun 2017 sebesar 100%, IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dengan target tahun 2017 sebesar 100%, dan IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang dengan target tahun 2017 sebanyak satu bahan pendapat.

Adapun realisasi dan nilai IKU masing-masing upaya peningkatan fungsi manajemen pemeriksaan tersebut pada Tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut.

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Realisasi IKU 1.1 sampai dengan triwulan IV tahun 2017 telah tercapai 65,57% atau lebih tinggi dari target sebesar 65% sehingga skor IKU 1.1 tahun 2017 adalah sebesar 100,88.
IKU 1.1 ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dalam periode lima tahun terakhir yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3.1
Realisasi IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian			
			2017	2016	2015	2014
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	100,88	65%	65,57%	51,20%	50,26%	58,00%

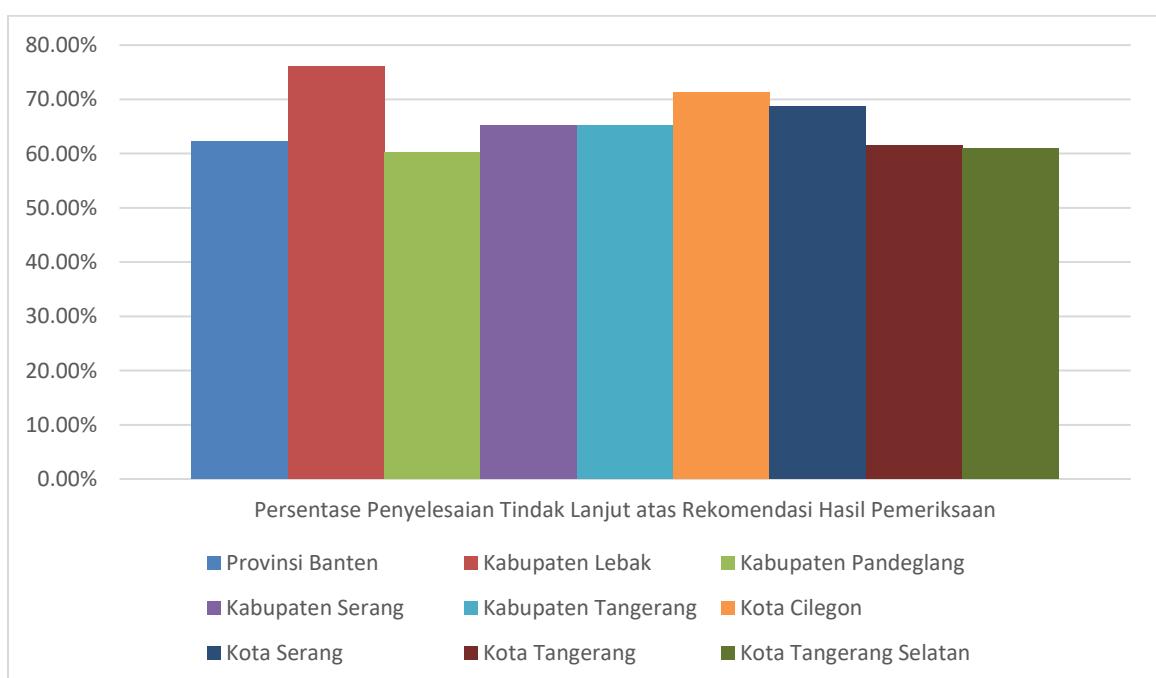
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKU 1.1 ini adalah karena selama tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Banten mengintensifkan pembahasan TLRHP dengan pemerintah daerah. Identifikasi pembahasan bukan hanya dari sisi jumlah atau frekuensi pembahasan, tetapi juga dari kualitas pembahasan. Selama tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Banten melaksanakan pembahasan TLRHP sebanyak

enam kali yaitu pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten Semester I (4 s.d. 7 Juli 2017), Pemerintah Kota Tangerang Selatan (5 Oktober 2017) , Pemerintah Kabupaten Pandeglang (10 Oktober 2017), Pemerintah Kabupaten Serang (23 Oktober 2017), Pemerintah Provinsi Banten (30 Oktober 2017) dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten Semester II (21 s.d. 29 Desember 2017). Dalam pembahasan TLRHP tersebut Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan terlibat langsung dalam beberapa pembahasan yang juga mengundang kepala daerah.

Hal tersebut sebagai implementasi Surat Edaran Anggota V BPK No.02/SE/VII/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 perihal kebijakan pemeriksaan di lingkungan AKN V yang antara lain mengatur sebagai berikut:

- a. inventarisasi TLRHP yang tidak bergerak/stagnan;
- b. mengintensifkan komunikasi penyelesaian TLRHP;
- c. TLRHP status 2 dan 3 namun secara substansif sudah ditindaklanjuti;
- d. Memperjelas rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- e. Penulisan nama secara lengkap pihak yang bertanggungjawab dalam matriks Laporan Hasil Pemantauan TLRHP.

Berikut Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Posisi 31 Desember 2017 pada Sembilan entitas di Perwakilan Banten.



Gambar 3.1 Grafik Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

2. IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke APH
- Realisasi IKU 1.2 sampai dengan Triwulan IV tahun 2017 telah tercapai sesuai target sebesar 100% sehingga skor IKU 1.2 Tahun 2017 adalah sebesar 100,00. IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktik tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk disetujui dan disampaikan ke APH.

Tabel 3.2

Realisasi IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke APH Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan					
1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke APH	100,00	100%	100,00%	0,00%	80,00% 0,00%

Pada Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Banten tidak menyampaikan temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana untuk disampaikan ke Ditama Binbangkum ataupun ke APH, mengingat bahwa selama tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Banten tidak menerbitkan LHP yang mengundang indikasi tindak pidana. Kebijakan pada IKU 1.2 apabila tidak terdapat realisasi IKU maka tidak mempengaruhi skor kinerja.

3. IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Tahun 2017

Realisasi IKU 1.3 sampai dengan Triwulan IV tahun 2017 telah tercapai sesuai target sebesar 100% sehingga skor IKU 1.3 Tahun 2017 adalah sebesar 100,00. IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK).

Tabel 3.3

Realisasi IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan					
1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100,00	100%	100,00%	0,00%	- -

Pada Tahun 2017, tidak ada permintaan perhitungan kerugian negara yang diajukan ke Perwakilan Provinsi Banten dari APH sehingga tidak dilakukan Perhitungan Kerugian Negara. Kebijakan pada IKU 1.3 apabila tidak terdapat realisasi IKU maka tidak mempengaruhi skor kinerja.

4. IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

Realisasi IKU IV 1.4 sampai dengan triwulan IV telah melebihi target yaitu sebesar 101,00% dari target sebesar 100% sehingga skor IKU 1.4 tahun 2017 adalah sebesar 101,00. IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli.

Tabel 3.4
Realisasi IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian
Keterangan Ahli Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian			
			2017	2016	2015	2014
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	101,00	100%	101,00%	101,00%	-	-

Pada triwulan IV tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah memenuhi Pemberian Keterangan Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pemeliharaan khusus atas belanja pemeliharaan, kendaraan roda 4 TA 2014 pada Biro Perlengkapan dan Aset Pemerintah Provinsi Banten.

5. IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

Realisasi IKU 1.5 sebanyak dua usulan bahan pendapat, jumlah ini melebihi target jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang tahun 2017 yang hanya ditargetkan sebanyak satu usulan bahan pendapat sehingga skor IKU 1.5 Tahun 2017 adalah sebesar 105,00. IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas AKN terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Tabel 3.5
Realisasi IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan
yang Dimanfaatkan Ditama Revbang Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian			
			2017	2016	2015	2014
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	105,00	1	2	2	2	1

Pada tahun 2017 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang sebesar 2 usulan bahan pendapat yang disampaikan Perwakilan Banten, yaitu:

- a. Dilema Penganggaran Pembangunan Jalan Desa pada Pemerintah Daerah antara Belanja Modal dan Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat; dan

- b. Apakah Hasil Pemeriksaan BPK Merupakan Sumber Informasi yang Harus Ditetapkan melalui Surat Keputusan Majelis?.

Ditama Revbang telah menyetujui bahan pendapat tersebut untuk dimasukkan sebagai database konsep bahan pendapat BPK.

SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan diukur melalui 2 IKU, yaitu IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan dengan target tahun 2017 sebesar 85%, dan IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dengan target tahun 2017 sebesar 20%,.

Adapun realisasi dan nilai IKU masing-masing upaya peningkatan fungsi Kualitas Perencanaan Pemeriksaan tersebut pada Tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut.

1. IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Realisasi IKU 2.1. tahun 2017 mencapai 95% atau sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 85% sehingga skor IKU 2.1 Tahun 2017 adalah sebesar 105,00. IKU ini menunjukkan tingkat kualitas perencanaan pemeriksaan di masing-masing perwakilan dan mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP).

Tabel 3.6
Realisasi IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian			
			2017	2016	2015	2014
SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	105,00	85%	95%	95,00%	-	-

Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Banten melakukan revisi Rencana Kegiatan Pemeriksaan Tahun 2017 karena adanya Pemeriksaan Tematik Administrasi Kependudukan dan Profesionalisme Guru dan Tenaga Pendidik serta perubahan beberapa pemeriksaan PDTT.

2. IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

Realisasi IKU 2.2. Tahun 2017 adalah 23,81% atau melebihi target tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 20% sehingga skor IKU 2.2 Perwakilan Banten Tahun 2017 adalah sebesar 105,00. IKU ini menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.

Tabel 3.7
Realisasi IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan					
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	105,00	20%	23,81%	21,74%	-

Pada Tahun 2017, Perwakilan Banten menerbitkan sebanyak 5 LHP kinerja dari 21 LHP yang terbitkan. LHP Kinerja dimaksud, adalah

- a. Pemeriksaan Kinerja Administrasi Kependudukan pada Kota Tangerang Selatan;
- b. Pemeriksaan Kinerja Administrasi Kependudukan pada Kabupaten Tangerang;
- c. Pemeriksaan Kinerja Administrasi Kependudukan pada Kabupaten Serang;
- d. Pemeriksaan Kinerja Peningkatan Profesionalisme dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten; dan
- e. Pemeriksaan Kinerja Peningkatan Profesionalisme dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Tangerang.

SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan fungsi Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan diukur melalui 6 IKU, yaitu IKU 3.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dengan target Tahun 2017 sebesar 100%, IKU 3.2 Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dengan target Tahun 2017 sebesar 100%, IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP dengan target Tahun 2017 sebesar 0%, IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK dengan target Tahun 2017 sebesar 3,70, IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP dengan target Tahun 2017 sebesar 100,%, dan IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang dengan target Tahun 2017 sebesar 100,00%

Adapun realisasi dan nilai IKU masing-masing upaya peningkatan fungsi Kualitas Hasil Pemeriksaan tersebut pada Tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut.

1. IKU 3.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC)

Realisasi IKU 3.1. tahun 2017 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan sebesar 100,00% sehingga skor IKU 3.1 Tahun 2017 adalah sebesar 100,00. IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Kode Etik dan Panduan Manajemen Pemeriksaan melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP).

Tabel 3.8
Realisasi IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian			
			2017	2016	2015	2014
SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
3.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC)	100,00	100%	100,00%	100,00%	-	-

Pada Tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam setiap tahapan pemeriksaan sudah terdapat reviu *Quality Control* (QC) oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) yaitu Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggungjawab dan Penanggungjawab pemeriksaan.

2. IKU 3.2 Pemenuhan *Quality Assurance* (QA)

Realisasi IKU 3.2. tahun 2017 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan sebesar 100,00% sehingga skor IKU 3.2 Tahun 2017 adalah sebesar 100,00. IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Kode Etik dan Panduan Manajemen Pemeriksaan melalui pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Tabel 3.9
Realisasi IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian			
			2017	2016	2015	2014
SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
3.2 Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA)	100,00	100%	100,00%	100,00%	-	-

Pada Tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam setiap tahapan pemeriksaan sudah terdapat reviu *Quality Assurance* (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) yaitu Kepala Perwakilan dan Kepala Subauditorat.

3. IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

Realisasi IKU 3.3. tahun 2017 adalah sesuai target yang ditetapkan sebesar 0,00% sehingga skor IKU 3.3 tahun 2017 adalah sebesar 0,00. IKU ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan.

Tabel 3.10
Realisasi IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian			
			2017	2016	2015	2014
SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	0,00	100%	0,00%	82,00%	-	-

Pada Tahun 2017 IKU 3.3 tidak diukur pencapaiannya walaupun terdapat target Tahun 2017 karena data tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP tidak tersedia.

4. IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

Realisasi IKU 3.4 tahun 2017 sebesar 4,50 atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 3,70 sehingga skor IKU 3.4 Tahun 2017 adalah sebesar 105,00. Indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup Integritas, Independensi, Profesionalisme.

Tabel 3.11
Realisasi IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian			
			2017	2016	2015	2014
SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	105	3,70	4,50	4,27	-	-

Pada Tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sehingga telah diperoleh hasil kuesioner untuk indeks kepuasan auditee/pemerintah daerah atas kinerja pemeriksa BPK.

5. IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Realisasi IKU 3.5 tahun 2017 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan sebesar 100,00% sehingga skor IKU 3.5 Tahun 2017 adalah sebesar 100,00. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian yang dinyatakan dalam program pemeriksaan.

Tabel 3.12
Realisasi IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian				
			2017	2016	2015	2014	
SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100	100%	100%	100,00%	100,00%	73,33%	

Pada Tahun 2017 telah diterbitkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Seluruh LHP telah disampaikan ke DPRD dan Pemerintah Daerah secara tepat waktu.



Gambar 3.1 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten

6. IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang

Realisasi IKU 3.6 tahun 2017 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan sebesar 100,00% sehingga skor IKU 3.6 Tahun 2017 adalah sebesar 100,00. IKU ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan.

Tabel 3.13
Realisasi IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang
Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian				
			2017	2016	2015	2014	
SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100,00	100%	100,00	-	-	%	

Pada Tahun 2017, tidak terdapat LHP yang diterbitkan oleh Perwakilan Provinsi Banten yang digugat.

SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Kualitas Hasil Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara diukur melalui 3 IKU, yaitu IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan target tahun 2017 sebesar 100%, IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dengan target Tahun 2017 sebanyak 18 laporan, dan IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang dengan target Tahun 2017 sebesar 100%.

Adapun realisasi dan nilai IKU masing-masing upaya peningkatan fungsi Kualitas Hasil Pemeriksaan tersebut pada Tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut.

1. IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Realisasi IKU 4.1. tahun 2017 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga skor IKU 4.1 Tahun 2017 adalah sebesar 100,00. IKU ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Tabel 3.14
Realisasi IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian				
			2017	2016	2015	2014	
SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100,00	100%	100,00%	100,00%	-	-	

Perwakilan Provinsi Banten telah memutakhirkankan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas 9 entitas yang dilakukan setiap semester di tahun 2017.

2. IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Realisasi IKU 4.2. tahun 2017 telah sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 18 laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dari 9 entitas yang dilaksanakan setiap semester pada tahun 2017 sehingga skor IKU 4.2 Tahun 2017 adalah sebesar

100,00. Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang.

Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga.

Tabel 3.15
Realisasi IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian			
			2017	2016	2015	2014
SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100,00	18	18	18	18	18

3. IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Realisasi IKU 4.3. telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% sehingga skor IKU 4.3 tahun 2017 adalah sebesar 100,00. Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Auditorat/Perwakilan ke Dit. EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD.

Tabel 3.16
Realisasi IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian			
			2017	2016	2015	2014
SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						
4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100,00	100%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%

Pada Tahun 2017, Perwakilan Banten telah menyampaikan laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara ke Dit. EPP dan telah melakukan penginputan ke Aplikasi SIKAD secara tepat waktu setiap semesternya.

SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan diukur melalui 9 IKU, yaitu IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten dengan target Tahun 2017 sebesar A, IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan target Tahun 2017 sebesar 95%, IKU 5.3 Persentase penyusunan *best-practice* dengan target Tahun 2017 sebesar 0,00; IKU 5.4 Persentase penyebaran *best practice* dengan target Tahun 2017 sebesar 0,00; IKU 5.5

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten dengan target Tahun 2017 sebesar 100%, IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan dengan target Tahun 2017 sebesar 100%, IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang dilaksanakan dengan target Tahun 2017 sebanyak 2 kegiatan, IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan target Tahun 2017 sebesar 93%, dan IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode etik dan Peraturan Disiplin dengan target Tahun 2017 sebesar 100,00%.

- IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten Sampai dengan Triwulan IV tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah memperoleh penilaian dari Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten dengan nilai A. Nilai A pada IKU 5.1 pada triwulan IV tahun 2017 tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga skor IKU 5.1 Tahun 2017 adalah sebesar 100,00. Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK.

Tabel 3.17
Realisasi IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan					
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten	100,00	A	A	A	-

- IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Hasil penilaian IKU 5.2. tahun 2017 oleh Biro TI adalah sebesar 74.93%, hasil ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 95% sehingga skor IKU 5.2 Tahun 2017 adalah sebesar 78,81 . BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, eDrive), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit). Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal. IKU ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong *IT culture* di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tabel 3.18
Realisasi IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan					
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	78,87	95%	74,93%	80,04%	100,00%

Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan layanan TI, maka untuk tahun 2018 pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan masuk ke Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan TI oleh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

3. IKU 5.3 Jumlah Usulan *Best-Practice*

Tahun 2017 IKU 5.3. tidak dilaksanakan (0,00%) sehingga skor IKU 5.3 tahun 2017 adalah sebesar 0,00. *Best-practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best-practice*.

\

Tabel 3.19
Realisasi IKU 5.3 Persentase Penyusunan *Best-Practice* Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan					
5.3 Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

Pada Tahun 2017 IKU 5.3 tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan dan merupakan IKU bonus.

4. IKU 5.4 Persentase Penyebaran *Best-Practice*

Tahun 2017 IKU 5.4. tidak dilaksanakan (0,00%) sehingga skor IKU 5.4 tahun 2017 adalah sebesar 0,00. *Best-practice* yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan, selanjutnya akan disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah *best-practice* akan disebarluaskan untuk pegawai.

Tabel 3.20
Realisasi IKU 5.4 Persentase Penyebaran *Best-Practice* Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan					
5.4 Persentase penyebaran <i>best practice</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-

Pada Tahun 2017 IKU 5.4 tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan dan merupakan IKU bonus.

5. IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten

Realisasi IKU 5.5. tahun 2017 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan sehingga skor IKU 5.5 tahun 2017 adalah sebesar 100,00 skor IKU 5.5 triwulan IV tahun 2017 adalah sebesar 100,00. Ketepatan waktu penyampaian LAK telah sesuai dengan SK Sekjen No.286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 3.21
Realisasi IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan					
5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan	100,00	100%	100,00%	100,00%	-
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten					

BPK Perwakilan Provinsi Banten sudah menyampaikan LAK Tahun 2016 kepada Direktorat PSMK secara tepat waktu yaitu pada tanggal 31 Januari 2017.

6. IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

Realisasi IKU 5.6. tahun 2017 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan sebesar sebesar 100% sehingga skor IKU 5.6 tahun 2017 adalah sebesar 100,00. Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan adalah sesuai dengan POS Perencanaan, yakni setiap tanggal 10 di bulan berikutnya.

Tabel 3.22
Realisasi IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan					
5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100,00	100%	100,00%	66,67%	-

Selama Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Banten menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktorat PSMK setiap bulannya secara tepat waktu.

7. IKU 5.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan

Realisasi IKU 5.7 tahun 2017 sebanyak 3,2 atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebanyak 2 kegiatan sehingga skor IKU 5.7 Tahun 2017 adalah sebesar 105,00. Kegiatan

media relation merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massa. Kegiatan *media relation* dapat diselenggarakan dalam bentuk: (1) Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dan (2) Pelatihan (*workshop*) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan.

Tabel 3.23
Realisasi IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian				
			2017	2016	2015	2014	
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan							
5.7 Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	105,00	2	3,2	2,60	2,60	2,60	

Pada Tahun 2017 Perwakilan Banten telah menerbitkan 4 *Press Release* masing-masing saat penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

8. IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Realisasi IKU 5.8 tahun 2017 telah mencapai 93,85% atau sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 93% sehingga skor IKU 5.8 Tahun 2017 adalah sebesar 100,91. Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

Tabel 3.24
Realisasi IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian				
			2017	2016	2015	2014	
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan							
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100,91	93%	93,85%	93,85%	92,90%	94,68%	

9. IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Realisasi IKU 5.9 tahun 2017 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga skor IKU 5.9 tahun Tahun 2017 adalah sebesar 100,00. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai.

Tabel 3.25
Realisasi IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor	Target	Capaian			
		2017	2017	2017	2016	2015	2014
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan							
5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin		100,00	100%	100%	-	-	-

Selama Tahun 2017 tidak terdapat pejabat dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Banten yang memperoleh pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan diukur melalui 2 IKU, yaitu IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dengan target Tahun 2017 sebesar 100%, dan IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) dengan target Tahun 2017 sebesar 90%.

1. IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
 Realisasi IKU 6.1. tahun 2017 hanya mencapai 89,47% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga skor IKU 6.1 tahun 2017 adalah sebesar 89,47. Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada lingkup AKN dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun.

Tabel 3.26
Realisasi IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor	Target	Capaian			
		2017	2017	2017	2016	2015	2014
SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan							
6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa		89,47	100%	89,47%	97,56%	50,00%	71,43%

Pada Tahun 2017 pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Banten belum seluruhnya memenuhi jam pelatihan 40 jam, hal ini disebabkan jadwal diklat yang bersamaan waktunya dengan jadwal pemeriksaan sehingga terdapat enam pemeriksa dari 40 pemeriksa yang jam diklatnya masih kurang. Untuk memenuhi standar tersebut, maka

tahun 2018 akan diajukan diklat pemeriksa yang dilaksanakan di kantor dan disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan pemeriksa. Selain itu, melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan/ *workshop*/ seminar/ *shortcourse*/ FGD/ KTF/ *working grup* lainnya merupakan SKP setiap pegawai sehingga diharapkan dapat meningkatkan Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa.

- IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Realisasai IKU Tahun 2017 hanya tercapai 54,55% dari target yang ditetapkan sebesar 90% sehingga skor IKU 6.2 Tahun 2017 adalah sebesar 60,61.

Tabel 3.27
Realisasi IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017	Capaian			
			2017	2016	2015	2014
SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan						
6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	60,61	90%	54,55	48,84%	-	-
			%			

Pada Tahun 2017, pegawai non-pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Banten yang belum seluruhnya memenuhi jam pelatihan 20 jam yaitu sebanyak 18 pegawai dari 33 pegawai non pemeriksa. Hal ini terjadi karena terbatasnya diklat yang ditawarkan pusdiklat yang dapat diikuti oleh pegawai non pemeriksa serta waktu pelaksanaan diklat yang bersamaan waktunya dengan kegiatan lainnya. Untuk Tahun 2018 kegiatan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan/ *workshop*/ seminar/ *shortcourse*/ FGD/ KTF/ *working grup* lainnya merupakan SKP setiap pegawai sehingga diharapkan dapat meningkatkan Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

SS.7 Tingkat Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan diukur melalui satu IKU, yaitu IKU 7.1 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan dengan target Tahun 2017 sebesar 82%.

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari empat indikator, yaitu: (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) pencapaian keluaran, dan (4) efisiensi.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Tabel 3.28
Realisasi IKU 7.1 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan
Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2017	Target 2017		Capaian		
		2017	2017	2016	2015	2014
SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan						
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	104,49	82%	85,68%	85,97%	91,53%	96,04%

Penilaian IKU 7.1 tahun 2017 dilakukan oleh Biro Keuangan dan hasil yang dicapai sebesar 85,68% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 82% sehingga skor IKU 7.1 Tahun 2017 adalah sebesar 104,49.

B. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Banten

Realisasi Belanja BPK Perwakilan Provinsi Banten sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar 17.642.227.373 atau 95,57 dari total anggaran belanja sebesar Rp18,459,476,000.00. menurut program, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program Tahun 2017

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	7.676.055.000	7.331.960.098	95,51
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	2.567.554.000	2.520.494.002	98,16
08	Pemeriksaan Keuangan Negara	8.215.867.000	7.789.773.273	94,81
Jumlah		18,459,476,000.00	17.642.227.373	95,57

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Banten ini merupakan sumbangan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 pada AKN V sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, Perwakilan Provinsi Banten telah mencapai skor kinerja Tahun 2017 yaitu sebesar 99,09 atau mengalami kenaikan kenaikan skor sebesar 2,18 dibanding Tahun 2016 yaitu sebesar 96,91, namun demikian masih ada beberapa indikator yang belum tercapai, antara lain:

1. IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2017 diperoleh hasil penilaianya dari Biro TI adalah sebesar 74,93% atau dibawah target sebesar 95%;
2. IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa Tahun 2017 hanya mencapai 89,47% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%; dan
3. IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) Tahun 2017 hanya mencapai 54,55% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%.

Strategi yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam pencapaian kinerja yang lebih baik ditahun mendatang, antara lain:

1. Pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan menjadi salah satu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan TI di Perwakilan Banten.
2. Mengatur jadwal pemeriksaan dan kegiatan non pemeriksaan secara tepat sehingga memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam hal teknis pemeriksaan dengan mengikuti kegiatan diklat dan pelatihan lainnya seperti KTF, *workshop* dan lain lain; dan
3. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan/ *workshop*/ seminar/ *shortcourse*/ FGD/ KTF/ *working grup* lainnya akan menjadi salah satu SKP setiap pegawai sehingga diharapkan dapat meningkatkan Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa serta meningkatkan persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Dengan memperhatikan rencana aksi sebagai langkah perbaikan, diharapkan pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Banten menjadi lebih baik dan lebih akuntabel untuk masa yang akan datang dan diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK

TARGET PENCAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017
(1)		(2)		(3)
SS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%
		IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
SS 2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
		IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%
SS 3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%
		IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%
		IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	-
		IKU 3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70
		IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%
SS 4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18
		IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
SS 5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten	A
		IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0
		IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best practice</i>	0%
		IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LAK Perwakilan Provinsi Banten	100%
		IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
		IKU 5.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	2
		IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%
		IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
SS 6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
SS 7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	82%

**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR**

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
SS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	65,57%	51,20	50,26
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	0%	80%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	100%	0	100%
		IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	101%	100%
		IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	2	2	2
SS 2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	95%	N/A
		IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	23,81%	21,74%	N/A
SS 3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	N/A
		IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	N/A
		IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	-	-	82%	N/A
		IKU 3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	4,50	4,32	N/A
		IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	N/A
		IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	N/A	N/A
SS 4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	N/A
		IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18	18	18	18
		IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
SS 5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten	A	A	A	N/A
		IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	74,93%	75,43%	100%
		IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0	0	0	N/A
		IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best practice</i>	0%	0%	0	N/A
		IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LAK Perwakilan Provinsi Banten	100%	100%	100%	N/A
		IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	66,67%	N/A
		IKU 5.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	2	3.2	2,60	1
		IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%	93,85%	93,85%	96,04%
		IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	N/A	N/A
SS 6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	89,47%	97,56%	71,43%
		IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	54,55%	48,84%	N/A
SS 7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	82%	85,68%	83.39%	N/A

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN TARGET LIMA TAHUN

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2017	Percentase Realisasi Tahun 2017 dibanding target Kinerja Tahun 2020
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3.7	3.8	3.9	4	4.5	113%
IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18	18	18	18	18	18	100%
IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten	A	A	A	A	A	A	100%
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	74.93%	75%
IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2017	Percentase Realisasi Tahun 2017 dibanding target Kinerja Tahun 2020
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LAK Perwakilan Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 5.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	2	2	2	2	2	3.2	160%
IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	96%	97%	98%	99%	93.85%	95%
IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	89.47%	89%
IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%	100%	54.55%	55%
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	90%	92%	94%	95%	96%	85.68%	89%

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Banten
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	%
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
SS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	65.57%	101%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%
		IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	101%
		IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	2	200%
SS 2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	112%
		IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	23.81%	119%
SS 3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%
		IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%
		IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	N/A	N/A	N/A
		IKU 3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3.7	4.5	122%
		IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%
		IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%
SS 4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%
		IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18	18	100%
		IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	%
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
SS 5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten	A	A	100%
		IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	74.93%	79%
		IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0	0%	N/A
		IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best practice</i>	0%	0%	N/A
		IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LAK Perwakilan Provinsi Banten	100%	100%	100%
		IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%
		IKU 5.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	2	3.2	160%
		IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%	93.85%	101%
		IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%
SS 6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	89.47%	89%
		IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	54.55%	61%
SS 7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	82%	85.68%	104%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017

: Rp 18,459,476,000.00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017

: Rp 17.642.227.373,00